



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS SOSIAL

Jl. Sampul No. 138, Sei Putih Barat, Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara 20118
Pos-el dinsos@sumutprov.go.id, Laman www.dinsos.sumutprov.go.id

SPEKIFIKASI TEKNIS

PEKERJAAN KONSTRUKSI

K/L/PD	: Provinsi Sumatera Utara
SATKER/OPD	: Dinas Sosial
PENGGUNA ANGGARAN	: Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara
KUASA PENGGUNA ANGGARAN	: HALIMATUS SAKDIAH, SE, MM(Sekretaris Dinas Sosial)
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	: AHMAD FAUZAN NASUTION, S.Si, M.AP (JABATAN)
NAMA PEKERJAAN	: Pemeliharaan Ringan Gedung Kantor Dinas Sosial Prov. SU (Perawatan Ringan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana)
SUMBER DANA	: APBD
TAHUN ANGGARAN	: 2024

Daftar Isi

1. LATAR BELAKANG	1
2. MAKSUD DAN TUJUAN.....	1
3. SASARAN.....	1
4. LOKASI KEGIATAN	1
5. SUMBER PENDANAAN	1
6. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA.....	2
7. REFERENSI HUKUM.....	2
11. PERSYARATAN TEKNIS PENYEDIA.....	3
12. METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN	4
13. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA.....	4
14. LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN	5
15. SERAH TERIMA PEKERJAAN.....	5
16. SANKSI	5

SPESIFIKASI TEKNIS

Paket Pekerjaan :

Pemeliharaan Ringan Gedung Kantor Dinas Sosial Prov. SU (Perawatan Ringan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana)

1. LATAR BELAKANG

Upaya peningkatan akses dan mutu layanan sosial melalui upaya pemenuhan standar sarana dan prasarana, sehingga perlu mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan tindakan nyata dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

maksud pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini diharapkan menghasilkan ruang kerja yang representatif sehingga tingkat layanannya menjadi maksimal dan suasana kerja lebih nyaman.

b. Tujuan

Tujuan pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini diharapkan menghasilkan kondisi ruangan lebih baik, struktur, sirkulasi ruangan lebih efisien dan lebih efektif serta kenyamanan bagi semua pegawai di lingkungan kantor Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

3. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Ringan Gedung Kantor Dinas Sosial Prov. SU (Perawatan Ringan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana) sebagai berikut:

- a. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Ringan Gedung Kantor Dinas Sosial Prov. SU (Perawatan Ringan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana) mengacu kepada Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, ketentuan yang terkait dengan Bangunan Gedung, Standar Nasional Indonesia tentang Bangunan Gedung dan standar teknis terkait, serta Peraturan daerah setempat tentang bangunan gedung.
- b. Adapun sasaran dari kegiatan Pekerjaan konstruksi ini adalah sebagai berikut :
 - Memperoleh calon penyedia jasa yang memiliki kompetensi dibidang Kontruksi Pemeliharaan Ringan Gedung Kantor Dinas Sosial Prov. SU (Perawatan Ringan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana) melalui Tender.
 - Terlaksananya Pekerjaan Kontruksi Pemeliharaan Ringan Gedung Kantor Dinas Sosial Prov. SU (Perawatan Ringan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana) yang akurat, lengkap, mutakhir dan efisien sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan batasan waktu pelaksanaannya.

4. LOKASI KEGIATAN

Lokasi Pekerjaan di Jl. Sampul No. 5, Medan. Kantor Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

5. SUMBER PENDANAAN

- a. Sumber Dana : APBD Tahun Anggaran 2024
- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan : Rp. 943.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah).
- c. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) : Rp. 942.265.000,00 (sembilan ratus empat puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

6. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan barang/Jasa:

K/L/PD	: Provinsi Sumatera Utara
Satker/OPD	: Dinas Sosial
Pengguna Anggaran	: Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara
Kuasa Pengguna Anggaran	: HALIMATUS SAKDIAH, SE, MM (Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara)
Pejabat Pembuat Komitmen	: AHMAD FAUZAN NASUTION, S.Si, M.AP (KEPALA SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN)

7. REFERENSI HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, harus mampu memenuhi persyaratan teknis bangunan gedung yang meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.
- b. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4201);
- c. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;
- f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- g. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia.

8. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Tahapan pelaksanaan kegiatan ini dimulai dari:

- 1) Pemilihan penyedia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Melalui penyedia;
- 2) Pengadaan ini dilaksanakan secara elektronik atau yaitu system Pengadaan Barang/Jasa Yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi serta transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 3) Metode pemilihan yang digunakan untuk mendapatkan penyedia adalah : Tender
- 4) Rencana pelaksanaan pemilihan penyedia dimulai Maret s/d Maret 2024;
- 5) Rencana pelaksanaan pekerjaan dimulai April s/d Juni 2024;
- 6) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu (yaitu sampai dengan serah terima pertama/*Provision Hand Over* (PHO) 60 (enam puluh) hari kalender.

9. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Adapun lingkup pekerjaan adalah :

- 1) Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya.

- 2) Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat.
- 3) Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan.
- 4) Menyusun gambar pelaksanaan (*shop drawing*) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya.
- 5) Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan.
- 6) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul atau dihadapi, dan surat-menyurat.
- 7) Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (*as built drawing*) yang selesai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa konsultasi pengawasan konstruksi dan diketahui oleh penyedia jasa konsultasi perencanaan konstruksi.
- 8) Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan konstruksi.

10. PERSYARATAN KUALIFIKASI PENYEDIA

1. Peserta Yang Berbadan Usaha Harus Memiliki Perizinan berusaha di bidang jasa konstruksi;
2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan jasa pelaksana konstruksi Gedung Perkantoran (BG 002) atau Konstruksi Gedung Lainnya (BG 009) dengan KBLI 41012;
3. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak;
4. Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan:
SKP = KP – P, dimana KP adalah nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
5. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
 - a. Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, dikecualikan dari ketentuan point tiga untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
 - b. Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas Miliar Rupiah).
6. Memiliki NPWP dengan status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak;
7. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);

11. PERSYARATAN TEKNIS PENYEDIA

A. Personil

Personil inti termasuk personil manajerial badan usaha dan tenaga terampil yang ditawarkan sesuai dengan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan termasuk data tingkat pendidikan atau sertifikat keterampilan, jabatan dalam pekerjaan yang diusulkan, yang ditempatkan secara penuh untuk pelaksanaan pekerjaan;

No	Jabatan	Jumlah Orang	Pengalaman Kerja	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Pelaksana	1 Orang	2 Tahun	Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung Jenjang 6
2	Ahli K3 Konstruksi	1 Orang	3 Tahun	Ahli Muda K3 Konstruksi
			0 Tahun	Ahli Madya K3 Konstruksi

B. Daftar Peralatan Utama

No.	Jenis Peralatan	Kapasitas	Jumlah
1.	Concrete Mixer/Beton Molen	0,3 – 0,6 m ³	2 Unit
2.	Generator Set	6.000 watt	1 Unit
3.	Mobil Pick Up	1.500 – 2.500cc	2 Unit
4.	Theodolite	Terkalibrasi Maksimal Akurasi 5' Dalam Kurun Waktu 6 Bulan Terakhir	1 unit
5.	Pompa Air	3, 5 Hp atau 0,5 m ³ /Mnt	1 Unit
6.	Light Truck Dump	3.000 - 5000 cc	1 Unit

C. Rencana Keselamatan Konstruksi

No.	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya (Skenario Bahaya)	Tingkat Resiko
1	2	3	4
1	Pekerjaan Persiapan	Tertimpa Material ketika membesihkan Bongkaran	Kecil
2	Pekerjaan Pembongkaran	Pekerja mengalami kecelakaan saat melakukan Mobilisasi Peralatan	
3	Pekerjaan Atap dan Plafond	Tertimpa material/alat kerja saat mengangkat.	Sedang
4	Pekerjaan Lantai	Gangguan kesehatan oleh debu akibat pencampuran beton.	Sedang
5	Pekerjaan Pintu dan Partisi Dinding	Tertimpah material bangunan dinding yang sedang dikerjakan	Sedang
6	Pekerjaan Handrail Ramp & Backdrop Resepsionis	Terkena tumpahan cat bisa kena ke mata	Sedang
7	Pekerjaan Pengecatan	Terkena tumpahan cat bisa kena ke mata	Sedang
8	Pekerjaan Elektrikal	Terluka akibat penggunaan alat kerja.	Sedang

Identifikasi bahaya tingkat resiko terbesar yaitu :

No	Uraian pekerjaan	Identifikasi bahaya	Tingkat Resiko
1	Pekerjaan Atap dan Plafond	Tertimpa material/alat kerja saat mengangkat.	Sedang

12. METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

Metode pelaksanaan pekerjaan mengacu kepada metode pelaksanaan yang telah ditetapkan pada rencana kerja dan syarat.

13. TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

Untuk Pekerjaan Pemeliharaan Ringan Gedung Kantor Dinas Sosial Prov. SU (Perawatan Ringan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana) TKDN yang harus dicapai Minimal 45 %.

14. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA

Lingkup kewenangan penyedia jasa yaitu:

- a. Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya.
- b. Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat.
- c. Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan.
- d. Menyusun gambar pelaksanaan (*shop drawing*) untuk pekerjaan- pekerjaan yang memerlukannya.
- e. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan.
- f. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat- rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul atau dihadapi, dan surat-menyurat.
- g. Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di *lapangan (as built drawings)* yang selesai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi dan diketahui oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi.
- h. Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan konstruksi

15. LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

1) Laporan harian

- a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
- b. penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
- c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
- d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
- e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
- f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- g. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan pengawas dan disetujui oleh wakil PPK.

2) Laporan Mingguan

Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal- hal penting yang perlu ditonjolkan.

3) Laporan Bulanan

Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal- hal penting yang perlu ditonjolkan.

16. SERAH TERIMA PEKERJAAN

Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.

17. SANKSI

PPK berhak memberikan teguran tertulis kepada Penyedia dalam hal :

- 1) Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan;
- 2) Sanksi yang diberikan PPK kepada penyedia sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari bagian harga kontrak yang terlambat.
- 3) Pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK dilakukan apabila setelah diberi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak;
- 4) Setelah pemutusan kontrak, pembayaran terhadap pekerjaan yang memenuhi syarat kontrak serta penyedia dicantumkan dalam daftar hitam penyedia atas wanprestasi atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban sebagai penyedia (setelah mendapatkan rekomendasi dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah);
- 5) Pengenaan sanksi dan denda ditulis dalam suatu Berita Acara pengenaan Sanksi dan/atau Denda yang ditandatangani kedua belah pihak.

Medan, Mei 2024

ditetapkan oleh:

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

HALIMATUS SAKDIAH, SE, MM

NIP.19710208 199803 2 001